



# Singkawang Belum Terima Dokumen 169 Aset dari Kabupaten Induk

**SINGKAWANG-RK.** Kendati Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang sudah berusia 13 tahun, 169 aset tidak bergerakanya masih atas nama kabupaten induk, 162 aset atas nama Kabupaten Sambas dan 7 aset atas nama Bengkayang.

"Sesuai aturan, Sambas menyerahkan dokumen aset kita itu harus ke Bengkayang dahulu. Kita tinggal menunggu kapan Bengkayang menyerahkannya ke kita," kata Drs Syech Bandar MSI, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang ditemui di Kantor Walikota Singkawang, Senin (11/5).

Sambas harus menyerahkan dokumen aset itu kepada Bengkayang terlebih dahulu, baru diteruskan ke Singkawang.

lantaran terkait pemekaran wilayah atau kabupaten/kota.

Seperti diketahui, pemekaran Kabupaten Sambas menghasilkan Kabupaten Bengkayang. Kemudian pemekaran Kabupaten Bengkayang menghasilkan Kota Singkawang.

Hingga kini Kota Singkawang belum menerima dokumen aset tersebut, lantaran Bengkayang meminta difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk penyerahannya. "Berita Acaranya (BA) sudah diserahkan kita. Tinggal menunggu kapan Pemprov Kalbar sempatnya. Insya Allah tahun ini selesai," kata Bandar.

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Singkawang, Drs Musli-min MSI mengatakan, akan mempercepat proses penyerahan dokumen aset daerah tersebut. "Kita akan telusuri dokumen aset-aset tersebut, baik yang masih di Sambas maupun Bengkayang," katanya.

Ketika ditanya penyebab lambannya penyerahan dokumen-dokumen aset tersebut, Musli-min menduga adanya tarik ulur kepentingan dari beberapa pihak. "Sedangkan yang memiliki kepentingan itu, saat ini sudah tidak lagi menjabat," ujarnya.

Selain itu, tambah dia, terdapat pula penyebab lainnya. Di antaranya adanya aset yang sudah diklaim individu. "Kita telusuri

itu dan hingga kita sudah menemukan satu aset yang diklaim warga. Saya yakin memang banyak yang sudah diklaim warga," kata Musli-min.

Kalau memang warga tersebut memiliki sertifikat atau dokumen lainnya yang menunjukkan kepemilikannya terhadap aset tersebut, kata Musli-min, Pemkot Singkawang bisa menuntut kabupaten induk. "Tetapi bisa saja itu hanya sebatas klaim warga yang bersangkutan," jelasnya.

Dengan belum selesainya penyerahan aset dari kabupaten induk ke Kota Singkawang ini, kata Musli-min, kekayaan Singkawang berupa aset-aset tidak bergerak, hanya ada bentuknya berupa tanah atau

bangunan, tetapi tidak tercatat, lantaran masih atas nama kabupaten induk.

Sehingga, tambah dia, Laporan Keuangan Kota Singkawang tidak akan pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Karena asernya ada, tetapi tidak tercatat di kita," ujar Musli-min.

Dia menargetkan, persoalan penyerahan dokumen aset ini akan segera diselesaikan. Targetnya tahun ini sudah selesai. "Ini harus cepat kita selesaikan, memang sudah menjadi rencana aksi. Sebab kalau tidak segera diselesaikan, semakin lama, akan semakin sulit," pungkask Musli-min. (dik)